

Korupsi dan Perempuan: Pengalaman Empiris dan Mitos

Adil Surowidjojo

Abstract

In the global anti-corruption effort, the idea that gender might play a role in behaviors that determine the prevalence of corruption has been explored. Research have been conducted in order to answer the question of whether women, who are perceived by various cultures to be imbued intrinsically of a "nurturing nature", when placed in strategic public and community roles, would behave differently than men in a way that would reduce the incidence of corruption. It appears that a number of these research efforts ultimately lead to the indication that gender does play a significant role within a particular culture in terms of the incidence of corrupt behavior - however this role does not seem to directly support the idea that a particular gender is more or less prone to corrupt behavior. Instead, the specific roles of a gender within a particular culture seems to open or close access to opportunities for corruption. This tentative finding would likely support the argument that improvements in gender equality, along with other progressive measures that improve good governance, would ultimately lead to a reduction on the impact of gender on opportunities for corruption by removing such opportunities in the first place.

Ketertarikan dan Usaha untuk Mencari Benang Merah Gender dan Perilaku Antikorupsi

Peran perempuan dalam pemberantasan korupsi adalah salah satu isu yang semakin diminati. Maraknya minat itu dapat diperkirakan akibat manifestasi dari ketidakpuasan masyarakat atas penanganan masalah pemberantasan korupsi oleh suatu sistem yang patriarkis. Dalam hal itu, tingkat dominasi patriarki dapat diartikan secara persepsi maupun secara riil dan tidak di dalam lingkup tulisan ini. Dari ketidakpuasan itu, dapat saja muncul suatu harapan bahwa patriarki gagal mengatasi pemberantasan korupsi karena atribut maskulin patriarki bisa saja dianggap kontra-produktif dengan perilaku antikorupsi. Sebaliknya, atribut feminin mungkin dianggap lebih kondusif dan sinergis terhadap gaya hidup antikoruptif.

Konsep dasar superioritas wanita versus laki-laki dalam konteks perilaku antikorupsi adalah atribut maskulin mencakup perilaku kompetitif dan mengambil risiko. Hal itu bisa diartikan 'menang dengan segala cara'. Artinya, laki-laki yang bekerja sebagai birokrat atau wakil rakyat akan lebih mungkin berperilaku koruptif. Sementara itu, atribut feminin dipersepsikan sebagai potret yang menjadi tulang punggung keluarga dan rumah tangga sehingga jarang sekali dianggap memiliki atribut-atribut maskulin, seperti perilaku kompetitif atau mengambil risiko. Dengan demikian, timbul konsep bahwa perempuan yang bekerja sebagai birokrat atau wakil rakyat dapat lebih diandalkan untuk tidak berperilaku koruptif.

Minat untuk mendalami konsep bahwa atribut feminin wanita memberinya semacam kelebihan intrinsik dalam menanggapi situasi-situasi rawan korupsi menimbulkan dua pertanyaan. Pertanyaan *pertama* adalah sejarah perempuan dalam memberantas korupsi. Pertanyaan *kedua* adalah peran wanita dalam pemberantasan korupsi dan cara peran itu dioptimalkan.

Dalam menjawab pertanyaan pertama, kita akan terbentur dengan fakta bahwa peran gender dalam konteks pemberantasan korupsi merupakan hal baru. Maka itu, kita bisa melihatnya dalam dasawarsa terakhir. Memang sudah ada beberapa penelitian mengenai pengaruh gender dalam konteks perilaku koruptif versus nonkoruptif. Dalam bagian selanjutnya, diperlihatkan beberapa penelitian mengenai gender dan korupsi yang menunjukkan kaitan korelatif antara gender laki-laki dengan meningkatnya perilaku koruptif dan gender perempuan dengan menurunnya perilaku koruptif.

Dalam bagian yang sama, ditunjukkan pula bahwa hasil penelitian itu tidak tanpa cacat. Selain itu, kaitan korelatif antara gender dan perilaku koruptif ternyata lebih kompleks dari sekadar anggapan bahwa laki-laki bertugas untuk mengambil risiko dan perempuan bertugas melindungi rumah tangga yang merupakan titisan dari nenek moyang. Ada pengalaman di berbagai negara berbeda mengenai peran gender dalam perilaku koruptif. Perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa dinamika gender di dunia, hanya dalam konteks perilaku koruptif, memang suatu area yang sangat dalam dan belum sepenuhnya dijelajahi.

Di luar gambaran yang disiratkan pengalaman-pengalaman tersebut, konsep superioritas gender perempuan dalam menangani situasi

korupsi juga terbentur pada pengalaman empiris seorang perempuan menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Republik Rakyat China, India, Taiwan, dan berbagai negara lain. Selain itu, diskusi tentang atribut feminin maupun maskulin diperkirakan tidak memberi kekebalan terhadap insentif riil perilaku korupsi ketika perempuan menghadapi situasi rawan korupsi secara riil turut dibahas dalam tulisan ini. Dalam hal itu, perempuan akan mendapatkan suatu *gain* dengan berperilaku koruptif.

Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan yang timbul dari persepsi ada hasil intrinsik yang timbul dari atribut feminin dan maskulin yang menunjang didukungnya satu gender dalam konteks pemberantasan korupsi. Dalam bagian “Pemberantasan Korupsi: Suatu Pekerjaan Besar Tanpa Gender”, kita melihat bahwa mendukung gender perempuan adalah pekerjaan yang terpisah dari—tapi sangat erat hubungannya dengan—pemberantasan korupsi.

Penelitian-penelitian yang disebut di atas juga menemukan bahwa negara-negara yang mendukung peran perempuan dalam pemerintahan—terutama dalam birokrasi negara dan dalam perwakilan rakyat—secara umum adalah negara-negara yang juga menemukan bahwa ada korelasi positif antara peran wanita dalam negara dan berkurangnya perilaku koruptif. Namun, korelasi itu hanya akan bertahan selama negara yang bersangkutan juga mengiringi peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan dengan peningkatan kebebasan lain secara umum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa emansipasi dan peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan merupakan salah satu prasyarat pembangunan dan evolusi suatu masyarakat untuk menjadi lebih maju, termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi. Untuk memastikan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pemberantasan korupsi dimaksimalkan, perlu ditanggalkan segala preconsepsi mengenai gender yang tidak didukung pengalaman empiris. Dalam hal itu, sudah ada penelitian yang mulai melihat peran gender dalam pemberantasan korupsi dapat di-*fine tune* demi mencapai efek maksimal. Hal itu mengukuhkan bahwa gender adalah faktor yang relevan dalam berbagai urusan pengembangan pemerintahan, termasuk pemberantasan korupsi. Wacana bahwa ada preconsepsi yang berpotensi menyesatkan mengenai peran gender dalam pemerintahan sebetulnya hanya bagian dari *baggage*

atau sisa preconsepsi-preconsepsi mengenai gender dalam sejarah manusia yang sampai sekarang masih belum tuntas pembahasannya.

“Mitos” Wanita Lebih Antikorupsi

a. Usaha Menilai Peran Gender dalam Perilaku dalam Situasi Rawan Korupsi secara Empiris

Development Research Group World Bank—dalam *paper*-nya “*Are Women Really the “Fairer” Sex? Corruption and Women in Government?*”¹—melakukan analisis terhadap peran gender dalam konteks perilaku koruptif. Usaha untuk melakukan suatu penilaian empiris terhadap isu itu dilakukan pertama dengan mengukur tingkat korupsi menggunakan indeks korupsi milik *International Country Risk Guide* yang bernama “CORRUPT.” Selain itu, Dollar et al juga mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintahan dengan menggunakan survei *Inter-parliamentary Union*, yaitu *Women in Parliaments: 1945—1995*, yang dinamakan “PARL”. Dollar et al kemudian menemukan data awal yang menunjukkan bahwa ada korelasi sangat tinggi antara CORRUPT dan PARL. Setelah data itu diolah lebih lanjut, ditemukan bahwa kehadiran wakil rakyat dengan gender perempuan menimbulkan efek pengurangan yang signifikan terhadap dideteksinya perilaku koruptif.

Tanpa analisis lebih lanjut, penemuan tersebut tentu memberikan insentif sangat tinggi bagi masyarakat yang serius ingin mengatasi permasalahan korupsi. Perlu diingat pula bahwa Dollar et al memberikan proviso bahwa ruang lingkup studi tidak mencakup pendeteksian faktor lain yang berkontribusi dalam mencapai kedua situasi itu: (i) peningkatan partisipasi wakil rakyat dengan gender perempuan; dan (ii) pengurangan tingkat terjadinya praktik korupsi oleh wakil rakyat.

Perlu diadakan analisis lebih lanjut untuk mengisolasi peran gender dalam perilaku koruptif. Namun, patut dipertimbangkan juga faktor yang dapat dianalisis terlebih dahulu. Apabila kemungkinannya lebih tinggi bahwa perilaku nonkoruptif disebabkan oleh faktor-faktor yang sama yang menyebabkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan termasuk di dalam birokrasi negara dan sebagai wakil rakyat, itulah faktor yang dianalisis terlebih dahulu.

¹ Dollar, Fisman and Gatti (1999), *Are Women Really the “Fairer” Sex? Corruption and Women in Government*, The World Bank, Development Research Group/Poverty Reduction and Economic Management Network, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.5857&rep=rep1&type=pdf>

Dalam artikel Transparency International *Are Women Less Corrupt than Men?*,² Farzana Awaz mendiskusikan topik ini dan mempertimbangkan juga penemuan-penemuan oleh Dollar et al. Awaz mengingatkan bahwa:

“Supaya ada pemahaman tentang peran perempuan dalam korupsi atau menilai dampak korupsi terhadap kehidupan perempuan, diperlukan pengamatan sangat detil atas norma-norma sosial-ekonomik serta kebudayaan yang membentuk kehidupan seorang perempuan dalam masyarakat tertentu... Apabila pemahaman tersebut tidak berhasil didapatkan, intervensi kebijakan yang lalu akan muncul akan menjadi terlalu sempit, seperti beberapa usaha pada awal tahun 2000-an untuk mempromosikan peran perempuan dalam badan-badan anti korupsi karena perempuan dianggap tidak se-koruptif laki-laki... Intervensi kebijakan perlu mengindahkan posisi perempuan dalam suatu masyarakat tertentu dan halangan apapun yang menghambat pengambilan keputusan riil oleh perempuan dalam masyarakat tersebut...”³

Peringatan tersebut perlu diindahkan sebagai insentif untuk meneruskan analisis yang dimulai oleh Dollar et al ke arah yang lebih spesifik, terutama cara masyarakat dapat mengatasi dua permasalahan sekaligus, yaitu: (i) cara mengurangi tingkat korupsi; dan (ii) cara meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Usaha seperti itu perlu didasari perubahan terhadap peran perempuan dalam suatu masyarakat tertentu, terutama apabila posisi perempuan dalam masyarakat itu masih di bawah laki-laki. Bagaimana situasi itu dapat diseimbangkan dalam konteks apa yang perlu terjadi pada kebudayaan masyarakat itu?

Posisi Nawaz dalam isu tersebut mirip dengan posisi Anne Marie Goetz. Dalam tulisannya “*Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?*”,⁴ ia memberikan banyak contoh

² Farzana Nawaz (2010), *Are Women Less Corrupt than Men?* Anti-Corruption Research News, Issue No. 2, <http://blog.transparency.org/wp-content/uploads/2011/10/ACRN-News-Issue-2-Feb-2010.pdf>

³ ibid

⁴ AM Goetz (2009), *Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?* <http://www.u4.no/recommended-reading/political-cleaners-how-women-are-the-new-anti-corruption-force-does-the-evidence-wash/>

riil tentang kompleksitas peran perempuan dalam usaha pemberantasan korupsi dan juga peran perempuan dalam pemerintahan. Posisi Goetz adalah konsep superioritas perempuan dalam perilaku antikoruptif hanyalah mitos. Itu tidak berarti bahwa Goetz tidak mendukung peran perempuan dalam usaha antikorupsi. Lebih tepatnya, seperti Nawaz, Goetz juga mengangkat isu bahwa di banyak negara di dunia, peran dan situasi wanita dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari setara dengan yang dialami laki-laki. Hal itu ternyata berdampak besar pada perilaku perempuan, termasuk dalam situasi-situasi rawan korupsi.

Goetz menawarkan dua poin utama⁵ dalam tulisannya. *Pertama*, peran gender dalam situasi-situasi rawan korupsi serta dalam konteks sosio-ekonomik dan kebudayaan suatu masyarakat adalah pada “kesempatan” untuk berperilaku korup. Perannya bukan pada “reaksi” terhadap situasi-situasi yang ada insentif untuk berperilaku koruptif (sebagaimana dikonsepsikan di atas). *Kedua*, untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pemberantasan korupsi pada level pemerintahan dan perwakilan rakyat, yang lebih relevan adalah memastikan perempuan mendapatkan akses pada kekuasaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga perkembangan sistem dan proses-proses pemerintahan dan perwakilan rakyat dalam masyarakat itu.

Analisis tersebut dapat lebih mudah dan lebih jelas dilaksanakan. Analisis itu juga berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dibandingkan perancang kebijakan di Indonesia bereksperimen untuk meningkatkan peran perempuan pada area-area yang rawan korupsi. Dalam konteks Indonesia, pengamatan yang mencermati kesempatan-kesempatan untuk berperilaku korup akan menghasilkan perbandingan mengenai *power balance* pejabat publik perempuan versus laki-laki. Ketimbang melihat reaksi pejabat publik baik perempuan dan laki-laki pada saat mereka terekspos terhadap kesempatan berperilaku koruptif, pendeteksian kesempatan untuk berperilaku korup akan memberi perancang kebijakan informasi mengenai cara mengurangi kesempatan-kesempatan itu melalui perubahan proses dan sistem.

Cara perempuan mendapatkan akses pada kekuasaan—baik dalam birokrasi pemerintahan maupun sebagai wakil rakyat—juga terkait dengan kesempatan untuk berperilaku koruptif. Goetz mengutip majalah *The Economist* yang mengamati fenomena di Asia Selatan

⁵ Ibid, hlm. 2.

dan Asia Tenggara. Beberapa figur perempuan dipromosikan pada tingkat kekuasaan pemerintahan yang tinggi berdasarkan hubungan mereka sebagai istri atau anak seorang penguasa laki-laki yang lengser atau meninggal. Hal itu merupakan pencerminan tidak kompetennya partai politik di negara-negara itu dalam menangani dinamika politik mereka.⁶ Situasi seperti itu menempatkan perempuan-perempuan yang bersangkutan dalam posisi yang sebenarnya agak sulit. Penempatan mereka dalam posisi kekuasaan tidak melalui proses yang sama dengan proses politik tradisional. Dengan demikian, dapat dimaklumi bahwa kemampuan, *network*, dan dukungan politik pemimpin-pemimpin perempuan itu pada saat mereka diangkat tidak secanggih kontemporer laki-laki yang sudah cukup waktu untuk mengembangkan keterampilan, koneksi, dan konstituen mereka.

Perbedaan posisi awal tersebut tentu berdampak secara signifikan pada sebagaimana efektif kepemimpinan mereka dan juga pada kesempatan untuk berperilaku korup. Menurut Goetz:

Karena pemimpin perempuan masuk secara lateral ke dalam partai, melalui koneksi pribadi dengan pria berkuasa, tidak naik dari bawah, atau mungkin melalui hubungan-hubungan bisnis, mereka sering tidak memiliki pengalaman dalam membangun aliansi politis, kemampuan untuk berdebat, kemampuan bertoleransi terhadap lawan politis, penyusunan strategi jangka panjang, mengumpulkan dana kampanye, dan mengembangkan kebijakan.⁷

Dengan demikian, tentu akan produktif juga apabila perancang kebijakan mencermati dampak dari sistem dan proses berlaku yang memberi akses pada kekuasaan kepada perempuan, apalagi jika masih ada perbedaan dengan yang dialami laki-laki. Jadi, ada pencermatan mengenai perbedaan perlakuan secara sistem dan proses terhadap laki-laki versus perempuan dan dampaknya pada kesempatan untuk berperilaku koruptif.

Wanita dan Keterlibatannya dalam Perilaku Koruptif

Dalam tulisannya, Goetz menyebutkan bahwa amat susah baginya untuk mendukung konsep bahwa memang ada atribut intrinsik

⁶ AM Goetz (2009), *Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?*, hlm. 10.

⁷ Ibid, hlm. 12.

perempuan yang dapat menyebabkan perempuan lebih kebal terhadap insentif untuk berperilaku koruptif dibandingkan laki-laki. Hal itu dipilih karena menurutnya, literatur mengenai perempuan dan politik masih sangat sedikit yang menitikberatkan reaksi dan keterlibatan perempuan dalam perilaku koruptif. Hal itu pun ia tekankan karena penelitian dalam bidang itu akan sangat sulit dilaksanakan karena terlalu banyak data yang hanya bersifat anekdot.⁸ Pada saat yang sama, kita mengetahui secara empiris bahwa perempuan juga terlibat dalam perilaku koruptif sehari-hari, baik di Indonesia maupun di negara lain.

Goetz memberi contoh di India. Di sana, disediakan lebih dari satu juta kursi di *panchayat* (sistem perwakilan rakyat di India) di beberapa daerah. Sejumlah pengamat proses, termasuk Neema Kudva yang juga menulis tentang hal itu, berpendapat bahwa perempuan memiliki peran dalam mengurangi perilaku koruptif pada *panchayat-panchayat* itu.⁹ Namun, ditemukan pula oleh penulis V. Vijayalakshmi bahwa perempuan yang mendapatkan kursi-kursi yang disediakan itu adalah istri atau kerabat dari pria-pria elit lokal. Perempuan-perempuan itu terimplikasi pula dalam jaringan perilaku koruptif suami atau kerabat mereka.¹⁰

Menurut Goetz, ketidakcocokan penemuan antara Kudva dan Vijayalakshmi akibat mereka mengamati dua fenomena yang berbeda. Goetz berposisi bahwa yang diamati Kudva adalah situasi bahwa pejabat perempuan berada di posisi kekuasaan secara lateral. Jadi, dia tidak memiliki kesempatan untuk berperilaku koruptif. Sementara itu, situasi yang diamati Vijayalakshmi adalah situasi sebaliknya. Pejabat perempuan telah menemukan celah untuk kemudian berperilaku koruptif. Goetz mengingat:

Ketika saya bekerja di lapangan [di Bangladesh], saya menemukan bahwa petugas wanita lapangan pemerintah Bangladesh yang paling berhasil membantu peminjam [*microfinance*] untuk mendapatkan hasil paling bagus untuk uang yang mereka pinjamkan adalah petugas yang menyuruh para peminjam untuk beraktivitas

⁸ AM Goetz (2009), *Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?*, hlm. 6.

⁹ Kudva (2003), *Engineering Elections: The Experiences of Women in Panchayati Raj in Karnataka, India*, hlm. 455.

¹⁰ Vijayalakshmi (2003), *Rent-Seeking and Gender in Local Governance*, <http://www.isec.ac.in/WP%20-%20164.pdf>

sedikit di luar garis lurus perilaku pasar: pembelian spekulatif dan penyimpanan komoditas seperti beras atau kayu bakar untuk dijual dengan harga tinggi di musim paceklik, praktik peminjaman dengan bunga tinggi ke wanita yang lebih miskin, [pemalsuan produk]... [dan] penyelundupan.¹¹

Cerita tersebut menurut pengamatan Goetz merupakan pencerminan bahwa sebetulnya ada dorongan kuat bagi baik pria dan wanita untuk mencapai suatu hasil yang baik atau yang buruk. Dalam hal itu, satu-satu atasan yang riil adalah ada-tidaknya kesempatan. Tentu, yang patut menjadi pertimbangan mendasar dalam usaha pemberantasan korupsi adalah cara kebijakan dapat menyusun sistem dan proses yang dapat menuntun pejabat pemerintah, baik dengan gender pria atau wanita, untuk tidak berperilaku koruptif.

Peran “kesempatan” dalam kaitannya dengan gender dan perilaku koruptif juga ditemukan di negara lain. Di China, hal itu muncul kembali sejak meningkatnya kebudayaan memiliki wanita simpanan atau *concubine* (*er nai*). Memiliki *concubine* di kultur China merupakan simbol status dan kesuksesan. Jika pada zaman dahulu kaisar-kaisar China menyimpan selir, kini banyak pejabat publik menyimpan *concubine* sebagai simbol meningkatnya kemakmuran mereka. Analisis terhadap perilaku para *concubine* ketika mereka dihadapkan pada situasi rawan perilaku koruptif ternyata mirip dengan hasil yang ditemukan oleh Goetz di Bangladesh. Kesempatan menimbulkan peningkatan perilaku itu. Fenomena itu ternyata juga meresahkan masyarakat dan pemerintah China.

[Partai Komunis Cina] melaksanakan survei pertama tentang status perkawinan pejabat publiknya, dan bahkan Komite survei tersebut di Beijing memerintahkan pejabat untuk melaporkan perubahan status perkawinan ke pihak yang berwenang... Hampir setiap pejabat laki-laki senior yang kini sedang diperiksa karena tuduhan korupsi ditemukan memiliki satu atau lebih wanita simpanan. Hal ini mendorong media untuk meminta pihak berwenang untuk memulai penyelidikan korupsi dengan mencari tahu apakah pihak yang diselidiki menyimpan wanita simpanan... Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan suami mereka oleh para wanita

¹¹ AM Goetz (2009), *Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?*, pada hlm. 15.

simpanan, pihak berwenang yudisial China telah melebarkan interpretasi tindak pidana penyuapan sehingga mencakup pemberian hadiah ke wanita simpanan seorang pejabat.¹²

Media China ramai melansir berita tentang para *er nai* karena dipacu juga oleh amarah masyarakat terhadap persepsi kemewahan hidup wanita simpanan yang terkait dengan perilaku koruptif olehnya atau oleh suaminya. Fenomena amarah itu juga dibicarakan oleh Goetz terkait pengalamannya di India dan di Bangladesh. Di sana, salah satu disinsentif untuk perilaku koruptif adalah rasa malu apabila ada kecurigaan bahwa status dan kekayaan seorang wanita didapatkan melalui kemampuannya untuk menggunakan pengaruh seksualnya. Menarik untuk dicermati bahwa disinsentif dan rasa malu itu tidak akan mencegah seorang pejabat atau *partner* korupsinya—baik mereka laki-laki atau perempuan—apabila insentif ekonomi praktik korupsi dapat mengimbangi atau melampaui disinsentif itu. Itu berarti bahwa taktik *naming and shaming* akan dibatasi tingkat kesuksesannya. Itu pun hanya akan efektif seiring dengan adanya perubahan sistem dan proses yang mencermati “kesempatan” untuk berperilaku koruptif. Di Indonesia, kasus yang menyangkut tersangka tindak pidana korupsi wanita Nunun Nurbaeti dan terdakwa Artalyta Suryani juga memberikan sedikit gambaran riil bahwa fenomena korupsi di Indonesia tidak dikekang oleh atribut intrinsik gender.

Pemberantasan Korupsi: Suatu Pekerjaan Besar Tanpa Peduli Gender

Usaha di Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan gender masih jauh dari optimal. Meskipun dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia masih dapat dianggap negara yang lebih progresif. Dalam konteks pemberantasan korupsi—baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, perbedaan persepsi mengenai peran gender dalam masyarakat menyebabkan timbulnya minat untuk menelaah konsep bahwa atribut intrinsik gender perempuan memberinya kelebihan-kelebihan dalam mengatasi situasi-situasi yang rawan perilaku koruptif.

Kita sudah melihat bahwa ada beberapa analisis, survei, dan penelitian awal yang dilakukan untuk menemukan peran gender dalam

¹² Stephen Wong (2009), *China's Concubine Culture is Back*, <http://www.atimes.com/atimes/China/KG26Ad01.html>

pemberantasan korupsi. Walaupun memang ada korelasi negatif antara partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan praktik korupsi, korelasi itu ternyata tidak mungkin diatribusikan hanya ke atribut intrinsik setiap gender.

Kita melihat bahwa peran gender dalam pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari usaha lebih umum untuk meningkatkan kesetaraan gender di dalam suatu masyarakat. Hal itu terutama dicerminkan dari penemuan empiris bahwa kesempatan atau *opportunity* bagi pejabat pemerintah perempuan untuk melakukan tindakan koruptif. Selain itu, dilihat juga dari cara pejabat itu mendapatkan akses pada kekuasaan, lebih relevan terhadap manifestasi perilaku koruptif, ketimbang atribut intrinsik gender pejabat itu. Dihadapi dengan kesempatan dan tingkat kekuasaan atau *influence* yang sama, kita melihat bahwa pejabat perempuan dan laki-laki mengambil pilihan yang sama untuk melakukan tindakan koruptif atau tidak.

Secara empiris juga, kita melihat bahwa kasus-kasus tindak pidana korupsi di berbagai negara—dari India, Bangladesh, China, dan Indonesia—merupakan fenomena yang tidak mengenal gender, hanya kesempatan.

Meskipun demikian, perjuangan di Indonesia untuk mempersempit jurang ketidaksetaraan antargender masih sangat relevan dalam usaha pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan karena perjuangan untuk kesetaraan antargender sangat erat hubungannya dengan perbaikan sistem dan proses yang menjadi tumpu dikurangnya kesempatan untuk berperilaku koruptif. Dapat dikatakan bahwa sejarah peran perempuan dalam pemberantasan korupsi—sebagai suatu bagian integral dari pemberantasan korupsi nasional—baru dimulai sekarang, seiring dengan setiap perubahan sistem dan proses yang dapat kita bina dan kawal bersama.

Daftar Pustaka

Dollar, Fisman and Gatti. "Are Women Really the "Fairer" Sex? Corruption and Women in Government". The World Bank, Development Research Group/Poverty Reduction and Economic Management Network, 1999, <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.5857&rep=rep1&type=pdf>>.

- Farzana Nawaz. "Are Women Less Corrupt than Men?". *Anti-Corruption Research News*. Issue No. 2, 2010. <<http://blog.transparency.org/wp-content/uploads/2011/10/ACRN-News-Issue-2-Feb-2010.pdf>>.
- AM Goetz. "Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?", 2009. <http://www.u4.no/recommended-reading/political-cleaners-how-women-are-the-new-anti-corruption-force-does-the-evidence-wash/>.
- Kudva. "Engineering Elections: The Experiences of Women in Panchayati Raj in Karnataka, India", 2003.
- Vijayalakshmi. "Rent-Seeking and Gender in Local Governance", 2003. <<http://www.isec.ac.in/WP%20-%20164.pdf>>.
- Stephen Wong. "China's Concubine Culture is Back", 2009. <<http://www.atimes.com/atimes/China/KG26Ad01.html>>.